



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2429-2445

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

Fauziah^{1✉}, Sujianto², Adianto³

Universitas Riau

Email: fauziah.muchtar84@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Latar belakang penelitian ini yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (DPO) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Camat Medang Kampai, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Kepala Dinas Perencanaan, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kota Dumai, Amk Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT. 01 kel. Mundam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk kriteria produksi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, sedangkan untuk indikator efisiensi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. lumayan bagus. sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan untuk indikator pembangunan dapat dikatakan cukup baik. Menurut pengertian indikator-indikator tersebut, menghasilkan barang dan jasa merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kendala efektivitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Negara – Pemerintah Daerah Kabupaten Medang Kampai Dumai mempunyai dua permasalahan yaitu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, lembaga dan anggaran daerah sehingga tidak dapat mencapai hasil Musrenbang yang baik.

Kata Kunci: *Efektivitas, Musrenbang, Pelaksanaan, RKPD*

Abstract

The background of this research is the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) which is an annual planning document. Therefore, local governments should organize development planning meetings (Musrenbang) in stages, starting from the lower level. Starting from the district, regency, district/city level to the provincial level, through the Regional Apparatus Organization (DPO) forum at the provincial, regency, and city levels. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of Musrenbang. in the Regional Development Work Plan (RKPD) at the sub-district level in Medang Kampai District, Dumai City. The method used in this research is descriptive qualitative method. Primary data was collected directly through interviews with resource persons, namely the Head of Medang Kampai Sub-district, Secretary of the Regional Planning and Development Agency of Dumai City, Head of the Dumai City Regional Planning, Planning and Development Office, Amk Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat and Head of RT. 01 kel. Mundam. The results of this study indicate that the implementation of Musrenbang for production criteria can be said to have not been implemented well, while for efficiency indicators it can be said that it has not been implemented well. pretty good. while for adaptation indicators it can be said to be quite good and for development indicators it can be said to be quite good. According to the understanding of these indicators, producing goods and services is the ability of an organization to produce goods or services in accordance with environmental needs. Obstacles to the effective implementation of the State Level Regional Development Work Plan (RKPD) Musrenbang - The Regional Government of Medang Kampai Dumai Regency has two problems, namely the lack of stakeholder participation, institutions and regional budgets so that they cannot achieve good Musrenbang results.

Keywords: *Effectiveness, Implementing, Musrenbang, RKPD*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sarana dan prasarana kecamatan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Kecamatan Medang Kampai merupakan salah satu perangkat daerah Kota Dumai yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di 4 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medang Kampai yakni Kelurahan Teluk Makmur, Mundam, Guntung, dan Pelintung.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah suatu forum perencanaan pembangunan formal yang berupaya menyelaraskan pretensi dari masyarakat yang bergantung dengan program pembangunan yang diusulkan oleh lembaga pemerintah. Forum Musrenbang ternyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Parahnya lagi, konflik muncul ketika model perencanaan ini tidak bisa memuaskan semua pihak.

Menurut Siagian (1983), pada hakikatnya semua kegiatan pembangunan hanya akan terbimbing jika dilandasi oleh rencana pembangunan dan diawasi serta dievaluasi. Sedangkan Menurut Supardi (1994), pembangunan merupakan suatu proses sosial yang menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Alexander (1994) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, termasuk ekonomi, politik, pertahanan, infrastruktur, institusi dan budaya, pendidikan dan teknologi.

Perencanaan pembangunan mempunyai banyak jenis yang berbeda-beda, tergantung dari sifat masing-masing jenisnya. Menurut Lincoln Arsyad (2001), tergantung pada masing-masing periodenya, perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada setiap tahapan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap evaluasi).

Moekijat (2000) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu persoalan memilih dan mengaitkan peristiwa-peristiwa serta membentuk dan menggunakan hipotesis tentang masa depan dari sudut pandang dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil. Musrenbang dapat dilaksanakan dalam pembangunan suatu daerah atau tidak dapat ditunjukkan dari langkah tersebut. Suoth Tinangon & Rondonuwu (2016) berpendapat bahwa efikasi diri adalah hubungan antara tujuan dan hasil. Semakin besar kontribusi tujuan terhadap pencapaian hasil, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Jika efisiensi berfokus pada hasil dan proses, efektivitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, kegiatan atau program dianggap efektif jika menghasilkan produk yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau dianggap bijaksana dalam membelanjakannya. Sedangkan menurut Gibson (dalam Purnomo, 2006), penelitian tentang efektivitas organisasi hendaknya dimulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, dengan urutan sebagai berikut:

1. Efektivitas pribadi, khususnya tingkat kinerja yang dicapai oleh setiap karyawan dalam organisasi.
2. Efektivitas tim, khususnya tingkat hasil yang dicapai oleh sekelompok karyawan dalam suatu organisasi.
3. Efektivitas organisasi, khususnya kontribusi kerja, merupakan hasil efektivitas kelompok dan efektivitas individu yang saling bersinergi.

Mengenai efektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan kabupaten Medang Kampai Dumai, tentu saja tidak mungkin memisahkan pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam pelaksanaannya. Menurut Hasibuan (2003), efisiensi kerja adalah suatu keadaan yang menyatakan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan mencakup kuantitas dan kualitas pekerjaan dan kecepatan pelaksanaan pekerjaan. Permasalahan Musrenbang masih menjadi bahan diskusi di setiap forum pembangunan dan kapan saja. Diungkapkan pemerintah, terlaksananya Musrenbang pada hakikatnya melibatkan masyarakat/*stakeholder* untuk bersama-sama memikirkan bagaimana terlaksananya Musrenbang. Musrenbang merupakan mekanisme yang merespon kebutuhan masyarakat dan cara pemerintah memenuhinya. Namun dalam proses pelaksanaannya, Musrenbang yang dilaksanakan di beberapa daerah hampir mempunyai kelemahan serupa, seperti: (Nor et al., 2018)

1. Tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan strategis di tingkat lokal.
2. Kinerja dengan koordinasi antar masyarakat dan instansi pemerintah belum terintegrasi.
3. Tidak ada jaminan kontrol terhadap pengambilan keputusan dari partisipasi masyarakat.
4. Sinkronisasi distribusi rencana kebutuhan dan pembangunan masyarakat tidak dapat terjamin sepenuhnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu, komprehensif, sistematis dan reaktif, dalam rangka mewujudkan kehidupan nasional dengan tingkat keberagaman masyarakat dan karakteristik geografis yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing daerah. Hal tersebut merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam hal ini diperlukan manajemen publik yang baik dalam menjalankan kegiatan, termasuk Musrenbang. Dimana manajemen publik menurut Shafritz dan Russell (Keban, 2008) diartikan sebagai usaha seseorang yang bertanggung jawab mengelola suatu organisasi dan menggunakan sumber daya (manusia dan mekanik) untuk memperoleh tujuan dari organisasi.

Usulan yang dari awalnya dimulai dari Rembuk RT hingga ke Musrenbang tingkat kelurahan dipilah dan disepakati dengan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang dan diinput melalui aplikasi SIPD (*Sistem Informasi Pemerintah Daerah*) dengan skala prioritas. penjelasannya dapat dilihat data 3 (tiga) tahun terakhir pada tabel dibawah ini, berikut adalah penjelasannya yang akan dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Usulan Kegiatan yang Belum/Tidak Disepakati

No	Kelurahan	Paket Pekerjaan	Usulan Kegiatan yang Disepakati			Usulan Kegiatan yang Belum/Tidak disepakati		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Mundam	Jalan	2	1	2	10	9	12
		Drainase	2	1	1	5	-	7
		Turap	-	-	-	-	-	-
		Jembatan	-	-	-	10	10	9
		Normalisasi Parit	-	1	-	5	10	7
2.	Teluk Makmur	Jalan	1	1	1	12	8	10
		Drainase	-	1	1	4	10	8
		Turap	3	-	1	5	-	-
		Jembatan	-	1	1	8	10	12
		Normalisasi Parit	-	-	-	-	-	-
3.	Guntung	Jalan	-	-	-	12	15	8
		Drainase	1	1	2	10	5	10
		Turap	-	1	-	-	-	-
		Jembatan	1	1	-	10	10	12
		Normalisasi Parit	1	1	1	-	5	8
4.	Pelintung	Jalan	1	1	-	13	12	15
		Drainase	-	1	3	6	3	-
		Turap	-	1	-	-	-	-
		Jembatan	1	-	1	11	10	10
		Normalisasi Parit	1	-	-	-	-	-
Jumlah			14	13	14	121	117	127

Sumber: *Dokumen Laporan Musrenbang 2022*

Dari banyaknya jumlah usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas, usulan yang belum disepakati ataupun tidak dimasukkan kedalam usulan yang menjadi prioritas dapat dikatakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan berbagai alasan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam usulan prioritas Musrenbang Desa dengan indikasi-indikasi sebagai berikut: (Sumber: Dokumen Laporan Musrenbang 2022).

1. Banyak usulan hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) yang tidak diprioritaskan dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten. Banyak usulan pada skala prioritas yang tidak diakomodir dan teralisasi.
2. Batasan waktu pemasukan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah) hanya sebatas memasukkan jumlah prioritas data usulan yang ditentukan oleh Bappeda Kota Dumai.

3. Kesalahan selalu terjadi ketika indikasi usulan kegiatan Musrenbang dikirimkan ke Organisasi Perangkat Daerah (DPO) terkait atau dinas terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan informasi secara deskriptif. Jenis penelitian ini memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah yaitu seorang peneliti mulai berfikir secara induktif untuk memperoleh fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan (fakta) di lapangan. Selanjutnya peneliti menganalisis dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medang Kampai yang merupakan kawasan industri terbesar di wilayah ASEAN sehingga aktivitas masyarakat jadi padat dan butuh infrastruktur yang bagus untuk kelancaran masyarakat setempat. Untuk memperoleh informan penelitian ini, digunakan teknik *purposive*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara informan. Pada penelitian ini, informan adalah Camat Medang Kampai, Sekcam Camat Medang Kampai, Sekretaris badan perencanaan dan pembangunan daerah Kota Dumai, Kasubbag perencanaan dan pembangunan daerah Kota Dumai, Amk lurah Mundam, Kasi pemberdayaan masyarakat, dan Ketua RT. 01 Kel. Mundam. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, mengelola data, membaca, menghafal, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, merepresentasikan, memvisualisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

a. Produksi (*production*)

Produksi barang dan jasa menunjukkan suatu kemampuan organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan lingkungan. Metrik produksi ini akan mencakup jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani, keuntungan penjualan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku Camat Medang Kampai menyampaikan:

"Dalam Musrenbang ini masih banyak usulan yang diprioritaskan skalanya pada subbidang musrenbang dan belum dilaksanakan sehingga pemerintah daerah tidak

dapat memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Kendala lain dalam pelaksanaan Musrenbang adalah kendala keuangan di daerah, sehingga tidak semua usulan dapat dipertimbangkan." (wawancara Bapak Indra Gunawan, senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Camat Medang Kampai, dimana disimpulkan bahwa terdapat banyaknya usulan yang diajukan dalam musrenbang masih belum terealisasi karena keterbatasan dana pembangunan yang mengakibatkan pembangunan yang diinginkan masyarakat belum terpenuhi meskipun usulan tersebut sudah masuk kedalam skala prioritas.

Usulan yang ditolak kemudian dimasukkan ke dalam *database* untuk dicari solusinya sehingga dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya. Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan pemerintah untuk mengidentifikasi proposal prioritas sangatlah penting. Selain itu, terdapat usulan rangkap, kesalahan pemilihan model, lokasi usulan tidak memungkinkan dilakukannya pekerjaan, kondisi obyek usulan masih layak pakai dan usulan tidak memenuhi kriteria. Berikut hasil wawancara Pak Zulfikar selaku Sekretaris Camat Medang Kampai, beliau menyampaikan:

"Dalam mewujudkan kesepakatan, stakeholder ikut serta dalam penyusunan dan perancangan RKPD. Namun keikutsertaan multipihak dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan perencanaan pembangunan di daerah seringkali tidak berjalan mulus, hal ini merujuk pada usulan kegiatan Musrenbang yang ditujukan kepada dinas terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (RPO)." (wawancara Bapak Zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa diperlukan suatu perencanaan untuk menjamin kegiatan pembangunan berlangsung secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan. Partisipasi masyarakat harus dioptimalkan agar tercipta dampak dan manfaat yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat pada proses perencanaan dan pembangunan. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dijamin. Musrenbang dipandang sebagai cara untuk menyerasikan program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kesuksesan Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya terutama untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat masih menjadi tanda tanya, nampaknya masih terdapat permasalahan berbeda-beda yang ditemui disetiap tingkatan mulai dari Desa Musrenbang, Kelurahan Musrenbang, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan untuk kriteria produksi dapat dikatakan bahwa tidak terlaksana

dengan baik. Berdasarkan pengertian indikator-indikator tersebut, produksi barang dan jasa menggambarkan kapasitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Metrik produksi ini akan mencakup jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani, keuntungan penjualan, dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini masyarakat merasa kurang puas dengan hasil kegiatan yang dilakukan.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi berhubungan langsung dengan hasil yang dikonsumsi oleh pelanggan. Efisiensi perlu diperhatikan agar suatu organisasi dapat bertahan. Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu perbandingan (rasio) antara *output* dan *input*. Ukuran efisiensi berkaitan dengan modal dan aset, tingkat keuntungan, biaya unit, amortisasi, depresiasi, dan lain-lain. Pernyataan perbandingan manfaat-biaya. Organisasi bertindak secara pragmatis dengan memastikan bahwa kepentingannya selaras dengan kekuatan dan kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan peluang lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota, beliau menyampaikan:

“Mekanisme pelaksanaan Musrenbang dapat dilihat pada kerangka kelembagaan yang merupakan diagram pengembangan program Musrenbang mulai dari tingkat RT, RW, kecamatan, dan tingkat kota. Berkembangnya program Musrenbang sebagai penentu rancangan kelembagaan pelaksanaan Musrenbang di Kota Dumai.”
(wawancara Bapak Suryadi, Selasa pukul 10.30 wib, tanggal 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan. Tujuannya sebagai pengidentifikasi prioritas praktis yang sedang dikembangkan daerah pada tahun 2024. Implementasinya Musrenbang ini merupakan wadah yang menerima saran, usulan, pendapat dari masyarakat, desa, kelurahan, dan kelurahan. Juga untuk menyatukan dan menyinkronkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana pembangunan daerah. Berikut hasil wawancara Bapak Andika Maharani dengan Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Medang Kampai bahwa:

“Melakukan survei lapangan untuk melaksanakan saran-saran yang akan dilaksanakan, untuk memastikan apakah operasionalnya bisa dilakukan atau tidak merupakan cara untuk mempertimbangkan saran-saran dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan agar lebih efektif. Waktu pemasukan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) terbatas, sehingga prioritas usulan pemasukan data

ditentukan oleh Bappeda Kota Dumai.”(wawancara Bapak Andika Maharani, Selasa 11 Juli 2023 pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan, keberhasilan diukur berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan dan penggunaan sumber daya yang digunakan efektif. Artinya semakin banyak biaya yang dimanfaatkan secara efektif dalam melaksanakan kegiatan dan semakin banyak pula pengelolaan sumber daya yang dilakukan sedemikian rupa. Hal tersebut memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan secara efektif. Penggunaan sedikit sumber daya belum tentu merupakan langkah efektif dalam melaksanakan program kerja. Hal ini ditentukan oleh kegiatan dan tujuan yang perlu dilaksanakan, karena ketika merencanakan kegiatan dengan tujuan dan sasaran, seringkali perencana dapat memilih sumber daya manusia dalam jumlah besar. Dengan waktu pengerjaan yang singkat atau lama serta instruksi kerja dengan tenaga manusia yang terbatas, hal ini mencerminkan hasil dari niat operator saat melakukan aktivitas tersebut.

c. Kepuasan (*satisfaction*)

Seringkali manajer yang cenderung menunjukkan seberapa baik organisasi dapat memenuhi kebutuhan karyawannya sehingga karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Hal ini dilakukan oleh manajer yang mencari keuntungan optimal. Optimalisasi berarti mencapai tujuan yang sesuai dengan kondisi organisasi untuk mempertahankan kinerja yang berkesinambungan, oleh karena itu diperlukan kemampuan beradaptasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku Camat Medang Kampai, beliau menyampaikan:

“Efektifitas pelaksanaan Musrenbang dapat dilihat dengan konsistensi capaian program yang bersifat bottom-up dan keterkaitannya dengan arah operasional Kota Dumai.”(wawancara Bapak Indra Gunawan, Senin 10 Juli 2023 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat meskipun pelaksanaan Musrenbang telah dilaksanakan dengan baik. Sebab, pada tingkat yang lebih tinggi (Musrenbang kabupaten), prioritas kegiatan yang diusulkan setiap tingkat desa/kelurahan harus sinkron dengan agenda pembangunan SKPD yang hakikatnya dari atas ke bawah. Pada tahap Musrenbang SKPD ini, terdapat usulan dari Musrenbang kecamatan yang pada akhirnya tidak masuk dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kota Dumai. Hal tersebut terjadi karena usulan masyarakat harus bersaing dengan yang lain. Ketidakefektifan

Musrenbang dipengaruhi oleh ketepatan usulan kegiatan, kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang, kurangnya dukungan, faktor anggaran, dan lain-lain.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, beliau menyampaikan:

"Segala bentuk usulan akan kita terima, hanya saja usulan prioritas yang memang akan kita akomodir untuk tahun selanjutnya. Kita akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan usulan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh Ketua LPMK, Ketua Forum RT dan beberapa utusan Kelurahan lainnya."(wawancara Bapak Suryadi, Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.30 wib)

Kemudian hasil wawancara Bapak Zulfikar selaku sebagai sekretaris camat Medang Kampai (hari Senin pukul 10.30 wib, tanggal 10 Juli 2023) mengenai Apakah tujuan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang diharapkan, beliau juga mengatakan bahwa:

"Banyak usulan hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) yang tidak diprioritaskan dalam berita acara Musrenbang Kecamatan. Banyaknya usulan skala prioritas yang tidak diakomodir atau teralisasi."(wawancara Bapak Zulfikar, Senin 10 Juli 2023 pukul 10.30 wib)

Berdasarkan kesimpulan hasil observasi dan wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa, indeks kepuasan belum terimplementasi dengan baik, karena kepuasan juga membawa manfaat kognitif bagi pengguna. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengelola konflik sekunder yang akan terjadi selama penggunaan. Masa depan. Membangun jiwa kompetitif agar kita bersaing untuk mencapai promosi terbaik di organisasi dan infrastruktur yang lebih lengkap dan memiliki kekuatan yang jelas. Selain itu, pelaksana berusaha menjamin kepuasan dari pengguna sehingga karya yang dilakukannya terus tumbuh dan berkembang merupakan suatu keunggulan. Dengan demikian pelanggan ingin kembali lagi dan mendapat referensi yang baik.

d. Adaptasi (*adaptiveness*)

Kemampuan beradaptasi adalah sejauh mana suatu organisasi dapat menerjemahkan perubahan internal dan eksternal yang ada sehingga organisasi yang bersangkutan kemudian dapat memberikan respons. Kemampuan beradaptasi ini lebih bersifat abstrak dibandingkan dengan isu-isu lain seperti keuangan, efisiensi, produksi dan lain-lain. Meski lebih abstrak, namun dapat diamati dari hasil-hasil penelitian. Jika suatu organisasi tidak dapat beradaptasi, kelangsungan hidupnya mungkin terancam. Manajemen dapat memberikan dampak yang mendorong kesiapan terhadap perubahan. Untuk menunjang

keberhasilan implementasi suatu perubahan, setidaknya harus didasari oleh kenyataan bahwa pada kondisi tersebut harus ada ketidakpuasan. Dengan adanya perubahan muncullah harapan bahwa organisasi dapat berkembang.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku camat Medang Kampai. Beliau mengatakan bahwa:

"Apa yang diusulkan dalam Musrenbang harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebutuhan ini akan dibahas untuk mengetahui apakah hal tersebut layak secara teknis, layak secara hukum dan menjadi prioritas, dan jika iya, maka dapat diupayakan." (wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)

Dari analisa penulis berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa kurangnya tenaga pendamping atau koordinator desa yang memiliki kemampuan dan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaan sarana perencanaan partisipatif merupakan prioritas operasional yang terkadang tidak dapat diperhitungkan pada proses perencanaan pembangunan. Hal ini diyakini dan disebutkan sebagai salah satu penyebab tidak dilakukannya proses pendataan atau analisis partisipatif terhadap situasi dan permasalahan desa/kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelompok pendukung atau koordinator desa agar dapat melakukan analisis partisipatif terhadap situasi dan permasalahan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan.

Berikutnya adalah hasil wawancara Bapak andika maharani beliau selaku dengan Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Medang Kampai, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"Persiapan perencanaan di Kecamatan Musrenbang sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) Musrenbang sendiri. Apabila usulan perencanaan dimulai di tingkat RT yang biasa disebut Rembuk RT, selanjutnya akan diajukan di tingkat kecamatan, hingga mencapai tingkat Musrenbang kecamatan.." (wawancara Bapak andika maharani selasa 11 juli 2023 pukul 11.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada transparansi dalam pelaksanaan Musrenbang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, pemerintah harus membuat pelaksanaannya lebih transparan. Forum partisipasi masyarakat saat ini hanya membahas perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan memiliki keterwakilan yang sangat sedikit dari masyarakat di forum kecamatan, yang mengakibatkan kehilangan banyak potensi manfaat. Kemudian hasil wawancara Bapak zulfikar selaku sebagai sekretaris camat medang kampai (hari senin pukul

10.30 wib, tanggal 10 juli 2023). Jika pelaksanaan kegiatan Musrenbang tidak sesuai ataupun terjadi kesalahan-kesalahan, Tindakan apa yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

"Musrenbang Kecamatan telah menyusun usulan prioritas masing-masing kecamatan di Kabupaten Medang Kampai dan menyelaraskannya dengan SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, sehingga proses pembangunan ke depan yang dilakukan pemerintah tidak mengalami modifikasi. bertentangan dengan SKPD atau RKPD, dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang jelas menyatakan bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dibuat untuk memadukan rencana kerja antar SKPD dan rencana pembangunan antar kabupaten." (wawancara Bapak zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)

Dari kriteria adaptasi berdasarkan hasil interpretasi analitis di atas, dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis. Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi harus dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan sosial, termasuk melaksanakan rencana perencanaan dan pengembangan. Salah satu cara untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja yang membutuhkan dukungan mudah adalah dengan menggunakan aplikasi SIPD. Aksesibilitas dan kemudahan mencapai tujuan menyebabkan penerapan aplikasi SIPD terus berkembang. Adaptasi tersebut dirasakan oleh pengguna, khususnya *stakeholder* dan operator, yang terhubung langsung dengan aplikasi SIPD ini. Ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan, yaitu adanya usulan-usulan yang diajukan sebagai permasalahan atau kegiatan di tingkat kecamatan, dan hal ini biasanya terjadi pada skala prioritas.

e. Perkembangan (*development*)

Perkembangan adalah tahapan setelah keberadaan jangka panjang. Untuk itu organisasi harus mampu mengembangkan kemampuannya. Sehingga dapat berkembang dengan baik sekaligus melalui tahap survival. Upaya pengembangan kapasitas tersebut antara lain melalui program pelatihan bagi pegawai. Dengan mengembangkan kapasitas organisasi diharapkan organisasi dapat berkembang baik untuk tujuan tersebut maupun untuk masa yang akan datang. Dalam berbagai bidang profesional, arti efisiensi berbeda-beda dan bergantung pada konteks penggunaan efisiensi. Namun secara umum para ahli sepakat bahwa pengertian efisiensi pada prinsipnya adalah tingkat hasil yang dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sarana, prasarana, dan sumber daya yang ada.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku camat Medang Kampai, beliau mengatakan:

"Setiap mekanisme perencanaan harus dipertanggungjawabkan kepada masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan, sehingga usulan pembangunan prioritas masing-masing kecamatan telah dilaksanakan dari Musrenbang Kecamatan."(wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)

Hasil analisis penulis berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan, model pembangunan Bottom-Up dan Top-Down harus sinkronisasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak. Pejabat tingkat kabupaten, pejabat tingkat kecamatan, dan faktor pembangunan dan faktor masyarakat harus lebih memahami mekanisme dan pentingnya perencanaan pembangunan melalui pelatihan atau pemahaman. Sebaliknya, pendekatan kerangka pembangunan yang proaktif terhadap masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Kemudian hasil wawancara Bapak zulfikar selaku sebagai sekretaris camat medang kampai, beliau mengatakan bahwa:

"Ketidakefektifan Musrenbang dipengaruhi oleh ketepatan usulan kegiatan, kurangnya dukungan, kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang, dan faktor anggaran."(wawancara Bapak zulfikar senin 10 juli 2023 pukul 10.30 wib)

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa kurangnya dukungan, kurangnya pendamping atau koordinator desa yang memiliki kapasitas dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan perencanaan memiliki partisipasi menyebabkan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan terkadang tidak terpenuhi diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Karena tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan musrenbang, maka proses pelaksanaan tahapan musrenbang terkesan lebih transparan hanya pada tahapan musrenbang bawah dan bawah, sedangkan pada musrenbang tingkat kabupaten, masyarakat sulit mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. aksesibilitas sepanjang usulan kegiatan dipertimbangkan.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan yang belum terpenuhi disebabkan oleh penyelenggaraan Musrenbang kegiatan yang memungkinkan masyarakat mengajukan usulan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Keterbukaan berdasarkan kepercayaan dan kebebasan informasi adalah dasar dari reformasi birokrasi yang konsisten dan transparan. Namun, transparansi jenis ini

sangat berbahaya, sehingga perlu adanya strategi untuk penerapan transparansi anggaran karena pihak-pihak yang tidak berkepentingan akan menimbulkan masalah.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

- a. Partisipasi yang Kurang Aktif dari *Stakeholder* dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait di Musrenbang Ditingkat Kecamatan

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang tau kelompok baik secara mental, ide dorongan lainnya. Partisipasi sangat dibutuhkan terutama saat melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang besar. Oleh sebab itu, untuk mencapai efektivitas pelaksanaan dari musrenbang juga dibutuhkan partisipasi dari stakeholder maupun perangkat daerah dimana merupakan pondasi utama untuk kelancaran pelaksanaan tersebut. Namun, yang terjadi kurang partisipasilah dari pihak-pihak terkait yang menjadi hambatan dalam evektivitas pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Dumai.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

"Kebijakan pemerintah atau stakeholder harus tegas dan mendukung kegiatan Musrempang" (wawancara Bapak Suryadi, selasa pukul 10.30 wib, tanggal 11 juli 2023)

Faktanya, kegiatan konsultasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan terhambat karena sulitnya mengadakan pertemuan OPD dengan *stakeholder* terkait. Diperlukan kebijakan tegas dari pemerintah untuk memastikan konsultasi yang baik antar pihak. Kami ingin ikut serta dan memberikan kontribusi, masukan dan program untuk memberikan pengembangan dan pengembangan. Pembangunan kecamatan di kabupaten Medang Kampai-Dumai.

Sejak awal kegiatan konsultatif rencana pembangunan di tingkat kecamatan, masyarakat menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan dan ajakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dengan sangat rendahnya aktivitas di tingkat kelurahan atau kelurahan. Hal ini juga berarti bahwa hasil pertimbangan perencanaan tidak begitu jelas karena peserta yang hadir tidak sesuai dengan harapannya. Berikut wawancara dengan Muhammad andai fathomi:

"Jumlah undangan tidak sesuai dengan jumlah yang menghadiri rapat hal ini

disebabkan beberapa masyarakat ada kegiatan yang lain untuk memenuhi ekonomi keluarganya pada Musrenbang Kelurahan/Kecamatan (wawancara Bapak Muhammad andai fathomi, senin 10 juli 2023 pukul 11.30 wib)

Kegiatan musrenbang yang dilakukan antara lain berdiskusi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat yang diajukan untuk Musrenbang, seski bertujuan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat, namun jumlah undangan tidak sesuai dengan jumlah peserta karena masing-masing komunitas sibuk dengan Pekerjaan masing-masing. Indra Gunawan selanjutnya menjawab:

"OPD terkait tidak hadir dalam musrenbang untuk Memberikan tanggapan dan penjelasan. karena masih banyak diantaraorang-orang didalamnya tidak memahami arti kegiatan musrenbang karena. bahkan OPD terkait yang datang tidak semuanya memberikan penjelasan untuk program-program di OPD nya".(wawancara Bapak Indra Gunawan, senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara, musrenbang merupakan hal yang peting dilakukan karena didalamnya terdapat usulan-usulan yang mampu membangun suatu daerah. Namun karena masih banyaknya ketidak hadiran pihak-pihak yang terlibat membuat musrenbang tidak dapat diusulkan seperti yang seharusnya. Dimana mereka masih banyak yang tidak memahami pentingnya musrenbang karena kurangnya pengetahuan, sehingga mereka yang datang dalam musrenbangpun memilih diam tanpa penjelasan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi *stakeholder* dan organisasi perangkat daerah membuat ketidak jelasan saat musrenbang dilakukan. Hal ini menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam renacna kerja pembangunan daerah. Sikap beberapa orang yang didalamnya masih acuh tak acuh sehingga banyak usulan yang tidak terealisasi di Kelurahan Kecamatan Medang Kampai.

b. Faktor Anggaran

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam suatu perencanaan pembangunan, yang mana anggaran mempunyai dua peranan penting dalam suatu organisasi, yaitu pertama sebagai alat perencanaan dan kedua sebagai alat pengendalian perencanaan. dalam musrenbang sendiri yang berisi usulan-usulan rencana kerja pembangunan daerah tentu harus memiliki perencanaan yang matang termasuk anggaran yang cukup untuk merealisasikan usulan tersebut. kefektikan dalam suatu pelaksanaan dilihat dari anggaran yang dibutuhkan. namun, yang terjadi anggaran menjadi hambatan

untuk kelancaran efektivitas pelaksanaan Musrenbang. Tanggapan dari Bapak Muhammad andai fathomi mengenai usulan anggaran untuk kegiatan musrenbang sebagai berikut:

"Seharusnya anggaran yang diberikan terinci agar mudah mengolah kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan aspirasi masyarakat. Perlunya ada konsultan atau tim ahli dalam memperhitungkan anggaran yang akan direalisasikan pada kegiatan tersebut." (wawancara Bapak Muhammad andai fathomi, senin 10 juli 2023 pukul 11.30 wib)

Anggaran yang diberikan secara terperinci agar mudah dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat karena musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan merupakan wadah yang paling besar untuk dapat mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Dan mereka yang merasakan hambatan apa yang terdapat dalam kegiatan. Dari rembuk RT, musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan musrenbang di tingkat kecamatan harus adanya konsultan atau tim ahli dalam memperhitungkan anggaran yang akan direalisasikan pada kegiatan tersebut karena untuk melakukan penyesuaian perhitungan terhadap dana yang tersedia. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan selaku camat Medang Kampai, beliau mengatakan bahwa:

"Efektifitas pelaksanaan Musrenbang ditunjukkan dari konsistensi pencapaian program. tapi yang sering masalah kita itu didananya yang tidak cukup kadang tidak ada untuk program yang kita usulkan. makanya programnya jadi tidak terlealisasi" (wawancara Bapak Indra Gunawan senin 10 juli 2023 pukul 09.30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa meskipun Musrenbang telah berjalan dengan baik, itu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Program yang diusulkan terpengaruh oleh anggaran yang tidak mencukupi. Pada tahap musrenbang SKPD ini, ada beberapa usulan dari musrenbang kecamatan yang tidak dimasukkan ke dalam program pembangunan yang tercantum dalam APBD Kota Dumai. Ini karena usulan masyarakat harus bersaing dengan yang lain. Program SKPD lebih terstruktur dan dapat diukur.

Dapat disimpulkan bahwa kendala efektifitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di tingkat Kecamatan Medang Kampai Dumai ada dua hal yaitu kurangnya partisipasi *stakeholder* dan organisasi daerah. sistem. dan anggarannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang yang baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dari penelitian ini berdasarkan pembahasan 5 indikator atau kriteria diatas, untuk indikator produksi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, namun untuk indikator lainnya secara efektif dapat dikatakan bahwa mereka tidak. baik, sedangkan untuk indikator kepuasan dapat dikatakan cukup baik, sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan untuk indikator pembangunan dapat dikatakan cukup baik. Dalam pengertian indikator-indikator tersebut, produksi barang dan jasa menggambarkan kapasitas suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungan. Sedangkan kendala efektifitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di tingkat Kecamatan Medang Kampai Dumai ada dua hal, yaitu kurangnya partisipasi *stakeholder* dan organisasi daerah serta anggaran yang belum memadai untuk mencapai hasil Musrenbang yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri
- Aini, Anni Nur et al. 2018. *Higeia Journal Of Public Health*. 2(2): 295–306
- Ananto, Purnomo. 2006. *Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah*. Jakarta : Departemen Kesehatan
- Arsyad, Lincoln. 2001. *Peramalan Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Moekijat. 2000. *Manajemen pemasaran*. Bandung : Mandar maju
- Siagian, SP. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- South, N, Tinangon J, Rondonuwu S. 2016. *Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol 4 No.4
- Supardi. 1994. *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya*. jakarta: PT. Rineka Cipta.